

**Desa dan Rumah Tangga Petani di Bawah Pembangunan:  
Kontekstualisasi Pemikiran *Sodality* S.M.P. Tjondronegoro dalam Agroekologi*****Villages and Peasant Households under Development:  
Contextualizing S.M.P. Tjondronegoro's Concept about Sodality in Agroecology***Gutomo Bayu Aji<sup>1,\*</sup>

Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia 12190

\*E-mail korespondensi: [gutomoba@gmail.com](mailto:gutomoba@gmail.com)

Received: March 14, 2021 | Revised: May 24, 2021 | Accepted: June 11, 2021 | Online publication: June 17, 2021

**ABSTRACT**

*This article attempts to contextualize the concept brought forward by S.M.P. Tjondronegoro regarding rural social organization under development. The framework used by Tjondronegoro makes it possible to re-open the discussion on villages and peasants from the point of view of peasant household economic theory. The central question of this discussion remains similar to Tjondronegoro's previous concern, such as the participation of rural communities under development. These two approaches touch the basic theory that views participation from different angles. By using the concept of sodality as a cultural mediation space, where cultural agroecology is seen as a representation of the agency and actions of peasants, the issue of participation in rural development can be seen more broadly. This effort places Tjondronegoro's concept within the spectrum of agroecological science and movement.*

**Key words:** *agroecology, participation, peasant-household economy, rural social organization, sodality*

**ABSTRAK**

Artikel ini berupaya mengkontekstualisasikan pemikiran S.M.P. Tjondronegoro mengenai organisasi sosial pedesaan di bawah pembangunan. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh Tjondronegoro memungkinkan dibukanya kembali diskusi mengenai desa di satu sisi dan petani dari sudut pandang teori ekonomi rumah tangga petani di sisi lain. Pertanyaan sentral dari diskusi ini masih sama dengan perhatian Tjondronegoro sebelumnya, yaitu mengenai partisipasi masyarakat pedesaan di bawah pembangunan. Diskusi dari kedua pendekatan ini menyentuh teori dasar yang memungkinkan melihat partisipasi dari sudut pandang yang berbeda. Dengan menggunakan konsep *sodality* sebagai ruang mediasi kultural di mana agroekologi budaya dilihat sebagai representasi dari agensi serta tindakan petani, persoalan partisipasi dalam pembangunan pedesaan dapat dilihat secara lebih luas. Upaya ini memungkinkan pemikiran Tjondronegoro itu diletakkan di dalam spektrum ilmu pengetahuan serta gerakan agroekologi.

**Kata kunci:** *agroekologi, partisipasi, ekonomi rumah tangga petani, organisasi sosial pedesaan, sodality*



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia

E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

## PENDAHULUAN

S.M.P. Tjondronegoro adalah seorang ilmuwan sosial, akademisi sekaligus intelektual publik yang berjiwa asketis. Jalan hidup yang langka di dunia akademik dan institusi riset tempat ia mencurahkan pengabdianannya pada bangsa ini. Pemikirannya jujur, terbuka dan membumi, bahkan suara hatinya untuk senantiasa membumikan pembangunan di Indonesia tidak berhenti sampai akhir hayatnya. Salah satu di antara sekian banyak karyanya mengenai pembangunan pedesaan tertuang di dalam bukunya yang berjudul *Social Organization and Planned Development in Rural Java* (Tjondronegoro, 1984). Buku ini diangkat dari disertasinya di Universitas Indonesia yang ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian diterbitkan oleh Oxford University Press dengan perubahan minimal.

Pemikiran Tjondronegoro tentang organisasi sosial pedesaan di dalam buku itu telah menjadi perhatian sepanjang pembentukan struktur organisasi pemerintahan tingkat ketiga selama masa demokrasi terpimpin. Partai-partai politik yang menjadi kekuatan demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno telah mencapai mufakat tentang bentuk pemerintahan tingkat ketiga yaitu desapraja. Suatu bentuk organisasi sosial pedesaan yang dimaknai di dalam Undang-undang 19/1965 tentang Desapraja sebagai daerah otonom tingkat ketiga yang berbadan hukum. Namun demikian, sebelum undang-undang itu dilaksanakan secara penuh, telah terjadi perubahan kekuasaan yang mengubah lanskap politik nasional secara drastis. Rezim Soeharto yang menguasai pemerintahan Orde Baru menetapkan Undang-undang 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengubah desapraja menjadi desa, yang bukan lagi sebagai daerah otonom melainkan sebagai unit administrasi pemerintah pusat.

Publikasi buku Tjondronegoro itu secara internasional telah menyebarkan wawasan kepada komunitas ilmu pengetahuan sosial dan humaniora di dunia mengenai perubahan situasi politik di dalam negeri Indonesia, terutama pembangunan pedesaan di Indonesia. Sebagian kalangan memunculkan pertanyaan baru tentang desa yang merupakan desa-desa administratif, minus keragaman, *top down* dan membatasi ekspresi politik warga desa dalam pelaksanaan demokrasi secara partisipatif (Arudsothy, 1986). Selain itu, banyak kalangan menaruh perhatian bahwa desa telah digunakan oleh rezim Orde Baru untuk memperlemah kekuatan-kekuatan politik supra-desa yang marak sebelumnya serta menjauhkan masyarakat desa terutama petani sebagai arena pertarungan politik.

Sebagai bagian dari studi pembangunan pedesaan yang dipublikasikan di masa-masa studi tentang petani sedang naik daun pada saat itu, buku ini tidak lepas dari perdebatan akademik. Setidaknya terdapat dua pokok pemikiran yang merangsang diskusi akademik mengenai hubungan antara kerangka pemikiran organisasi sosial pedesaan di dalam buku itu dengan teori ekonomi rumah tangga petani. Pertama, kerangka pemikiran organisasi sosial yang digunakan untuk melihat desa sebagai entitas politik pemerintahan modern yang cenderung bersifat pasif (van Ufford, 1985). Tinjauan terhadap masalah ini setidaknya telah disampaikan Philip Quarles van Ufford melalui ulasan singkatnya sebagaimana berikut:

*“The peasantry is almost treated as a passive entity, transforming, changing, disintegrating as the pressures from above increase. It almost seems as if 'history' takes hold of them. There are no counter-forces, there is no theory of the changing peasantry which takes the internal dynamics into account as well as the external.” (van Ufford, 1985, p. 779)*

Tinjauan kritis yang disampaikan oleh van Ufford itu bisa membuka diskusi lebih luas terkait perdebatan yang berkembang saat itu, yaitu ketika desa diletakkan di dalam perbincangan teoritik tentang petani, terutama sesudah munculnya teori moral ekonomi petani yang disampaikan oleh Scott (1977). Selain itu, juga ketika desa diletakkan di dalam perbincangan teoritik tentang komunitas pedesaan sesudah munculnya teori kemiskinan petani yang disampaikan oleh Geertz (1963) yang analisisnya terkait respons petani terhadap tekanan eksternal terkesan berlebihan. Perdebatan mengenai hal ini sempat menghangat ketika muncul kritik metodologi yang melihat teori itu tidak didasarkan pada data empiris (White, 1983), sehingga sempat membuat Geertz merasa gusar saat itu.

Kedua, perhatian Tjondronegoro mengenai lembaga tradisional di bawah desa yang disebut dengan istilah *sodality*, suatu istilah yang menyerupai “misi suci” yang berakar dari teologi Kristen zaman kuno yang digunakan untuk menjelaskan spirit komunalisme di bawah desa. Dalam melihat hal ini, van Ufford juga mengajukan beberapa pertanyaan kritis sebagai berikut:

*“He states that the only viable communal loyalties are to be found at the dukuh, hamlet, level and advocates that the government take these into account in a more ‘participatory’*

*approach. Here the theoretical debate becomes important, because it also has very practical consequences. How do we look at these dukuh institutions? Are they to be regarded as the 'remnants' of traditional loyalties at the local level? Or are they manifestations of a process in which the peasants keep the outer forces out of their way as much as possible? Is this importance of dukuh institutions not to be regarded as a reaction against governmental incursions?" (van Ufford, 1985, p. 779)*

Studi lain yang memberikan perhatian pada pentingnya peran lembaga tradisional di bawah desa, di dalam dukuh (dusun, kampung) sebenarnya juga memperkuat sodality, antara lain dinyatakan untuk menyeimbangkan ketegangan akibat perbedaan kelas sosial yang meningkat (Schweizer, 1983). Tetapi, penekanan Tjondronegoro agar pemerintah mempertimbangkan hal itu di dalam pembangunan tampaknya tidak pernah didengarkan oleh pihak penguasa. Sementara itu, pembangunan pedesaan yang sentralistik berdampak pada perubahan organisasi sosial yang semakin formal. Di beberapa daerah seperti DIY dan Jawa Tengah, dukuh direorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan desa menjadi kepala dukuh dan bayan, kemudian ditetapkan sebagai kepala urusan di dalam pemerintahan desa yang bersifat administratif. Selain itu, potensi sodality semakin terpinggirkan seiring menguatnya pendekatan stakeholder yang dipromosikan oleh Bank Dunia untuk menggeser demokrasi partisipatif menjadi demokrasi perwakilan yang mengutamakan elite pemerintahan serta tokoh-tokoh masyarakat desa dalam pembangunan.

Mengkontekstualisasikan sodality saat ini tentu menghadapi konteks formalisasi pemerintahan desa yang semakin kuat. Tetapi upaya ini dipandang penting setidaknya untuk menghidupkan kembali diskusi akademik mengenai masalah pedesaan saat ini terkait dengan ekonomi rumah tangga petani. Salah satu tawaran diskusi yang menjembatani kedua isu tersebut berasal dari ramuan antara dimensi kultural yang terkandung di dalam sodality dengan praktik ekologi budaya petani yang berbasis pada unit ekonomi rumah tangga. Dimensi kultural itu melihat sodality sebagai ruang mediasi yang memperantarai agensi serta tindakan dari tekanan globalisasi (Appadurai, 1996). Sementara itu, pendekatan terhadap unit ekonomi rumah tangga petani telah dibangkitkan kembali dari tradisi Chayanovian di bawah tekanan sistem kapitalisme global saat ini (Van der Ploeg, 2009).

Dalam hal ini, pendekatan unit ekonomi rumah tangga petani menempati posisi penting karena organisasi sosial ini seperti atom yang bisa menjadi benteng pertahanan ekonomi rumah tangga petani paling otonom dari berbagai tekanan eksternal. Dalam uraiannya mengenai unit ekonomi petani di beberapa negara di dunia, Van der Ploeg menggambarkan contoh-contoh unit usaha ekonomi petani yang bersifat otonom yang berakar dari pendekatan ekonomi rumah tangga Chayanovian sebagai respons dari tekanan sistem pertanian kapitalisme. Dilihat dari sudut pandang petani kecil di Jawa, praktik ekonomi rumah tangga serupa tidak hanya bisa dilihat dari perkembangan usaha pertanian lestari, melainkan juga yang lebih mapan dalam bentuk agroekologi pekarangan.

Tulisan ini berupaya mengkontekstualisasikan sodality yang bukan lagi sebagai organisasi sosial di bawah desa, melainkan sebagai ruang mediasi kultural di antara unit ekonomi rumah tangga petani dan organisasi sosial desa di bawah tekanan pembangunan terutama sistem pertanian dan pangan global. Manifestasi ruang mediasi itu ditemukan di dalam praktik ekologi budaya petani dalam bentuk agroekologi pekarangan, yang direpresentasikan melalui ekonomi rumah tangga petani secara kultural. Dilihat dari sudut pandang ini, petani sebenarnya telah berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan dari bawah: menggerakkan produksi rumah tangga secara adaptif, mengembangkan ekonomi kawasan melalui jaringan pasar lokal, mencukupi kebutuhan gizi, nutrisi serta kesejahteraan rumah tangganya melalui praktik kedaulatan pangan. Sudut pandang ini lebih dinamis daripada ketika petani dilihat melalui kerangka organisasi sosial desa yang memosisikan pembangunan pedesaan dan revolusi hijau sebagai penentu.

## **METODE**

Tulisan ini disusun berdasarkan studi kepustakaan terhadap (1) pemikiran S.M.P. Tjondronegoro yang tertuang di dalam buku *Social Organization and Planned Development in Rural Java*, (2) teori ekonomi rumah tangga petani Chayanovian, (3) makna *sodality* di era globalisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Appadurai, dan (4) konteks agroekologi budaya terutama yang terkait dengan studi-studi pekarangan di Jawa. Analisis terhadap teks-teks kepustakaan tersebut dilakukan dengan menempatkan *sodality* di dalam relasi kontekstual antara desa dan rumah tangga petani di mana

agroekologi dalam konsep kebudayaan setempat bertahan sebagai ruang mediasi kultural di antara petani dari berbagai tekanan eksternal. Analisis ini menuntut pemaknaan baru terhadap *sodality* di dalam konteks agroekologi yang khas yang lebih sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya sebagai ilmu pengetahuan modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dari kerangka organisasi sosial desa ke ekonomi rumah tangga petani

Di tengah optimisme yang dibangun oleh pemerintah setidaknya sebagaimana terlihat di portal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap masa depan desa dan BUMDesa saat ini, tesis tentang organisasi sosial desa dan *sodality* yang disampaikan oleh Tjondronegoro seperti sedang menghadapi tantangan ulang. Apakah konsep otonomi desa di bawah UU 6/2014 tentang Desa yang berbeda sama sekali dengan konsep Desapraja menyediakan peluang perubahan dari desa-desa yang merupakan unit administrasi pemerintahan pusat menjadi desa-desa yang masyarakatnya terutama kalangan petani lebih partisipatif dalam pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan makna spiritualitas dari konsep *sodality* dewasa ini? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab dalam usia undang-undang itu yang belum genap sewindu. Tetapi, melihat undang-undang itu yang tidak mengatur masalah penguasaan tanah di desa di mana sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di daerah pedesaan saat ini (White, 2017), mungkin menjadi petunjuk bahwa desa di bawah undang-undang sekarang bukanlah organisasi sosial pembangunan yang merepresentasikan suara mayoritas petani di pedesaan.

Pandangan terhadap desa yang bernuansa pesimis, selain visi demokrasi desa dalam undang-undang desa sekarang yang tidak bergerak maju (White, 2017), semakin terkesan suram dengan adanya perubahan Pasal 1 poin 6 UU 6/2014 tentang Desa di dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang menetapkan BUMDesa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa atau gabungan desa yang setara dengan badan hukum usaha lainnya seperti perusahaan, koperasi dan sebagainya. Di berbagai media massa, BUMDesa memang terlihat memberikan sedikit lapangan kerja terutama bagi pemuda desa, tetapi sangat jarang terdengar adanya BUMDesa yang merupakan suatu badan usaha pertanian yang melibatkan sebagian besar petani kecil di desa itu. Para pengelola BUMDesa, yang terkesan dipilih dari kalangan warga berpendidikan yang pada umumnya bukan petani mayoritas, seperti terbawa euforia pengembangan bisnis yang bias kepentingan kelas menengah ataupun elite desa, antara lain usaha jasa dengan perhitungan keuntungan dari retribusi serta efek usaha kecil yang tercipta dari rantai pelayanannya.

Kenyataan bahwa diversifikasi pekerjaan penduduk desa terutama di kalangan pemuda desa sekarang semakin heterogen di bawah pembangunan mungkin telah mendapatkan artikulasi yang baik melalui badan usaha itu. Tetapi fakta bahwa sebagian besar lapangan pekerjaan di daerah pedesaan masih didominasi sektor pertanian adalah kenyataan lain yang membuktikan bahwa desa dan badan usahanya itu bukanlah entitas yang sepenuhnya merepresentasikan suara mayoritas warga desa, yaitu petani kecil. Fakta ini memperlihatkan bahwa untuk melihat partisipasi warga desa, kerangka pemikiran organisasi sosial desa bukanlah pendekatan yang bias merepresentasikan karakteristik mayoritas warga desa. Terutama untuk menempatkan aspirasi petani kecil, teori ekonomi rumah tangga petani tampaknya lebih bisa mendekati kenyataan.

Melalui Tabel 1 di bawah ini, penulis menjelaskan perbedaan kedua kerangka pemikiran itu melalui beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan di dalam ruang mediasi kultural atau praktik agroekologi di dalam budaya Jawa yang khas yaitu pekarangan. Dari gambaran umum setidaknya terdapat dua penjelasan. Pertama, beberapa aspek yang diperbandingkan memperlihatkan perbedaan artikulasi di mana kerangka pemikiran organisasi sosial desa cenderung merepresentasikan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down approach*) yang tidak menyentuh kepentingan lapisan masyarakat pedesaan paling bawah terutama petani kecil (Tjondronegoro, 1978), sedangkan kerangka pemikiran ekonomi rumah tangga petani terlihat sebaliknya. Kedua, perbedaan pada kedua kerangka pemikiran ini sebenarnya bisa dimediasi melalui *sodality*, apabila konsep ini dimaknai sebagai ruang mediasi kultural sebagaimana yang dimaksudkan oleh Appadurai di atas, di mana petani memainkan peran pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Selain itu, apabila makna ini dihubungkan dengan

pendekatan penghidupan berkelanjutan yang ditawarkan Scones (2015), maka ia bisa digunakan untuk melihat kaitan lebih luas dengan agroekologi.

Tabel 1. *Sodality* sebagai ruang mediasi di antara kerangka pemikiran organisasi sosial desa dan ekonomi rumah tangga petani

Aspek-aspek mediasi	Organisasi sosial Desa		Ekonomi rumah tangga petani
Unit analisis	Desa		Rumah tangga
Kepemimpinan	Kepala desa		Kepala rumah tangga
Keanggotaan	Warga desa		Individu keluarga
Relasi dengan negara	Administratif	Ruang mediasi ( <i>sodality</i> )	Hak
Mekanisme hubungan	<i>Top down</i>		Partisipasi
Sifat relasi	Statis		Dinamis
Politik produksi	Revolusi hijau		Agroekologi
Sistem pasar	Sentralistik		Pasar lokal
Politik pangan	Keamanan pangan		Kedaulatan pangan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan berbagai pustaka

Kritik terhadap kerangka organisasi sosial desa dan pandangan tentang *sodality* di atas sebenarnya tidak merepresentasikan pemikiran Tjondronegoro secara utuh dan menyeluruh. Dalam karyanya yang lain yang disunting bersama sejawatnya Gunawan Wiradi, mereka menunjukkan pentingnya pendekatan yang memberikan penekanan pada ekonomi rumah tangga petani (Tjondronegoro & Wiradi, 1984). Ia bersama sang guru agraria itu memperlihatkan analisis yang tajam terhadap pola-pola penguasaan tanah di Jawa dengan memberi penekanan pada masalah distribusi penguasaan tanah terutama di kalangan petani tunakisma. Dari analisisnya itu bisa ditengarai hubungan kerja penyakapan di Jawa seperti sistem sewa-menyewa lahan pertanian berukuran kecil yang marak di kalangan rumah tangga petani.

Namun demikian, analisis terhadap struktur penguasaan tanah itu belum memberikan penekanan penuh terhadap unit ekonomi rumah tangga petani. Analisis terhadap unit ekonomi rumah tangga petani dan kaitannya dengan sumber daya produksi serta reproduksi tenaga kerja pertanian sebenarnya telah dilakukan dengan mengesankan di dalam disertasi Ben White berjudul *Production and Reproduction in a Javanese Village* di Columbia University. Di dalam karya ini, White melihat ekonomi rumah tangga petani di pedesaan Jawa sebagai unit ekonomi sebagaimana yang digunakan oleh Chayanov, tetapi dengan pendekatan yang lebih Marxis yaitu mempertimbangkan (reproduksi) tenaga kerja rumah tangga petani sebagai fungsi dari produksi serta keseimbangan sumberdaya secara menyeluruh (White, 1976).

Pandangan White terhadap unit ekonomi rumah tangga petani di Jawa pada saat itu tampak berjarak dengan tradisi Chayanovian yang dipandanginya ekstra ekonomis. Tetapi melalui refleksinya hampir selama setengah abad terakhir sebagaimana yang tertuang di dalam esai pendeknya yang dipublikasikan di situs *Journal of Agrarian Change* dan mungkin juga sesudah mempertimbangkan perdebatan yang kurang diperlukan antara Bernstein dan Ploeg yang menghidupkan kembali perbedaan antara Marx dan Chayanov (White, 2018), ia untuk pertama kali menyampaikan pandangan agar pendekatan Chayanovian bisa digunakan untuk melengkapi pendekatan kelas yang diajukan oleh Lenin sebagai berikut:

*“This was the first time that I tried to suggest that class-based and Chayanovian models were more complementary than generally assumed. We need both the Leninist tradition to explain the forces and tendencies which set in motion processes of agrarian class differentiation, and the Chayanovian for the co-existing forces and tendencies which explain why in so many parts of the world, class differentiation has not culminated in class polarization, and large masses of*

*smallholder petty commodity producers co-exist with (and often outnumber) the 'opposing' classes of emerging capitalist farmers and landless workers". (White, 2020)*

Melalui refleksinya yang panjang terutama terhadap masalah diferensiasi agraria di pedesaan Jawa serta perdebatan di antara kedua pendekatan itu, ia berpandangan bahwa pertentangan di antara kedua pendekatan itu tampaknya lebih banyak terjadi di tingkat asumsi daripada ketika digunakan sebagai pendekatan untuk melihat masalah di lapangan. Situasinya akan berbeda ketika berhadapan dengan kenyataan di lapangan di mana berbagai fakta empiris tidak bisa didekati hanya dengan satu pendekatan tunggal, melainkan diperlukan pertimbangan untuk melihat irisan dari beberapa aspek yang ada (White, 2020).

### **Unit organisasi agroekologi**

Meskipun White memberikan penekanan sumberdaya pertanian pada lahan sawah yang umumnya merupakan sawah-sawah berukuran kecil, namun bukan berarti lahan pertanian yang tidak teririgasi seperti lahan-lahan pekarangan di sekitar rumah tangga petani yang dialokasikan untuk tanaman pangan selain beras, kayu-kayuan, herbal tradisional, pakan ternak dan fungsi ekologis lain tidak diperhitungkan. Lahan-lahan itu yang di Jawa Tengah lazim disebut dengan pekarangan atau dalam sebutan lokal *kebon* merupakan bagian dari sumberdaya ekonomi rumah tangga petani yang penting dari generasi ke generasi. Konsep sumberdaya pekarangan di dalam perekonomian rumah tangga petani bahkan dipengaruhi oleh pengendalian terhadap karakteristik ekologis yang khas sehingga menyerupai tutupan hutan kecil di sekitar rumah tangga dengan struktur dan jenis tanaman yang didomestikasi sebagai lumbung kehidupan.

Penjelasan mengenai sumberdaya pekarangan ini setidaknya terlihat dari kesimpulan di dalam disertasi White yang tidak hanya membatasi cakupan konsep cara produksi pada sistem produksi rumah tangga melainkan juga pada sistem mata pencahariannya, sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

*"The conclusions of this study are ..., where changes in systems of human reproduction were viewed as dependent on changes in systems of production or "modes of gaining a livelihood", and changes in the economic function of the family as providing the link through which the former may be translated into appropriate fertility behavior". (White, 1976, p. 373)*

Merujuk pada konsepsi penghidupan yang bersumber dari mata pencaharian (*livelihood*) yang dijelaskan oleh para ahli agraria sebagai penjelasan terhadap diversifikasi pekerjaan di luar pertanian akibat kemunduran pertanian di pedesaan saat ini, maka sumberdaya yang semakin penting saat ini tidak hanya meliputi lahan pertanian sawah tetapi juga lahan pertanian pekarangan yang mempunyai peranan di dalam ekonomi rumah tangga petani di pedesaan Jawa.

Melalui koneksi dengan konsepsi *livelihood* ini, terutama mempertimbangkan pertanian sawah yang dikendalikan secara ekonomi-politik melalui sistem revolusi hijau, agroekologi pekarangan di Jawa menempati posisi sumberdaya ekonomi rumah tangga yang semakin diperhitungkan di dalam formulasi White di atas. Di desa di mana White melakukan penelitiannya antara kurun 1972-1973, pekarangan juga mendapatkan perhatian terutama hubungan antara sumberdaya pekarangan dengan perekonomian rumah tangga di desa itu (Stoler, 1978). Melalui analisisnya, ia melihat bahwa lahan pekarangan di desa mencakup 15 hingga 75 persen dari area yang ditanami, memberikan 20 persen pendapatan rumah tangga dan 40 persen kebutuhan nutrisi rumah tangga.

Studi-studi pekarangan sebelumnya, seperti yang pertama kali dilakukan oleh Ochse dan Terra pada tahun 1930-an yang ditujukan untuk menyelidiki masalah kemiskinan dalam kaitannya dengan meningkatnya populasi di pulau Jawa dan studi pekarangan yang dilakukan oleh Penny dan Singarimbun di Sriharjo pada tahun 1970-an, telah memberikan gambaran yang bervariasi tentang perekonomian rumah tangga petani. Studi-studi ini termasuk studi yang dilakukan oleh Soemarwoto di *kebon talun* di Jawa Barat kemudian, merupakan studi-studi awal tentang pekarangan di bawah pembangunan yang memperlihatkan hubungan positif antara sumberdaya yang ada dengan ekonomi rumah tangga petani. Walaupun praktik agroekologi khas di pedesaan Jawa ini telah bertahan selama berabad-abad, namun menurut Stoler perlu dilakukan penyelidikan lebih seksama sebagai dasar kebijakan pembangunan pedesaan dan agraria, sebagaimana berikut ini.

*"Javanese home gardens have survived for at least nine centuries as economically and ecologically viable and efficient agro-systems. Before any programs can confidently attempt to*

*'improve' them, intensive studies are needed to evaluate their existing structure and economic importance in rural household production strategies". (Stoler, 1978, p. 101)*

Bukti-bukti yang berasal dari berbagai studi itu menunjukkan bahwa praktik agroekologi pekarangan yang khas di pedesaan Jawa memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkonomian rumah tangga petani. Tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa sumberdaya pertanian dan pangan di pedesaan itu meliputi bukan hanya lahan pertanian sawah, tetapi juga lahan agroekologi pekarangan. Dengan begitu, merujuk pada formulasi White di atas di mana tenaga kerja rumah tangga merupakan fungsi dari produksi dan keseimbangan sumberdaya kehidupan secara menyeluruh, agroekologi pekarangan juga memainkan peran keseimbangan ekonomis dan ekologis yang sangat penting dalam keberlanjutan sistem produksi. Selain itu, melihat praktik kebudayaannya yang telah bertahan selama berabad-abad, agroekologi pekarangan telah terbukti mempunyai peran dalam memperkuat sistem pangan dan penghidupan berkelanjutan di tingkat rumah tangga serta lokalitas tertentu.

### **Agroekologi budaya**

Sebagai praktik agroekologi yang khas yang bersifat adaptif dan yang telah bertahan selama berabad-abad, pekarangan di Jawa termasuk yang bisa dikatakan lambat dalam perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan modern, apabila dibandingkan dengan praktik agroekologi di berbagai belahan dunia Barat seperti di komunitas otonom Basque di Spanyol ataupun pada gerakan agroekologi di Amerika Latin. Sekalipun sebagai ilmu pengetahuan modern, agroekologi di dunia masih bisa dikatakan sebagai penemuan yang relatif baru. Sebagaimana disebutkan dalam kepustakaan yang ada, istilah agroekologi digunakan pertama kali oleh ahli agronomi Rusia yaitu Bensin pada tahun 1930-an (Wezel & Soldat, 2009). Istilah ini kemudian berkembang sebagai pendekatan konseptual dan metodologis sejak awal tahun 1980-an hingga saat ini.

Berkembangnya agroekologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan pada dasawarsa 1980-an di dunia sebenarnya juga ditandai dengan beberapa studi mengenai pekarangan di Jawa sebagaimana disebutkan di atas. Tetapi konteks perkembangannya di dunia, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun gerakan sosial, tidak tumbuh dengan baik di Jawa, terutama sebagai alternatif terhadap sistem revolusi hijau: di mana pemerintah di Indonesia menciptakan sistem ekonomi politik pertanian monokultur, di bawah kendali industrialisasi serta dominasi rezim pangan global. Sebaliknya, rezim Orde Baru justru mengangkat keberhasilan revolusi hijau sebagaimana pencapaian swasembada beras yang pertama kali dalam sejarah Indonesia sebagai legenda pada tahun 1984. Sistem ekonomi politik pertanian yang menjadi dominan ini juga disertai kontrol terhadap organisasi petani dan aktivitas produksinya sehingga mengakibatkan praktik agroekologi pekarangan di Jawa menjadi kerdil dibandingkan dengan praktik-praktik serupa di belahan dunia lain.

Sementara itu di kancah global, agroekologi mengalami perkembangan pesat sebagai disiplin ilmu pengetahuan modern yang semakin ketat. Dalam kurun waktu setengah abad terakhir, definisi agroekologi berkembang semakin kompleks. Pada awalnya, agroekologi didefinisikan sebagai penerapan konsep dan prinsip ekologi pada desain dan pengelolaan ekosistem pertanian berkelanjutan (Gliessman, 1997). Tetapi kemudian berkembang mencakup seluruh sistem pangan (Francis et al., 2003), dengan fokus pada ekonomi politik (Gliessman, 2015). Lapangan baru ini kemudian membuka jalan untuk memperluas agroekologi ke dalam perspektif ekologi politik yang secara diskursif dipilah menjadi dua, yaitu (1) wacana kritis ekonomi-politik agraria, dan (2) wacana reflektif gerakan agrarian (Rosset & Altieri, 2017).

Perkembangan agroekologi di dunia yang begitu cepat juga tidak terlepas dari kemajuan gerakan petani internasional yang dicapai oleh La via Campesina yang menyediakan jaringan pertukaran pengetahuan di antara petani sebagai basis gerakan kedaulatan pangan; tandingan dari sistem pangan kapitalisme (Val et al., 2019) (Rosset et al., 2019). Menurut mereka, dalam konteks gerakan petani La via Campesina, agroekologi dan kedaulatan pangan juga disebut sebagai proyek alternatif untuk kehidupan berdasarkan hubungan baru antara manusia dan antara manusia dengan alam. Hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Gliessmann, telah meletakkan agroekologi di dalam konteks ekonomi politik ini sebagai berikut: (1) agroekologi sebagai ilmu pengetahuan, (2) agroekologi sebagai praktik, dan (3) agroekologi sebagai gerakan sosial.

Walaupun agroekologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat di kancah internasional dalam setengah abad terakhir, namun perkembangan itu terkesan terlepas dari dua

konteks teoritik yang menyertainya. Pertama, sebagai disiplin yang telah berkembang secara interdisipliner kadang-kadang masih digunakan terlalu teknis di satu sisi dan juga terlalu politis di sisi lain. Kecenderungan teknis biasanya dipengaruhi oleh disiplin agronomi ataupun pertanian yang dalam fase perkembangan definisi di atas sebenarnya berada pada fase awal pada tahun 1980-an. Sementara itu, kecenderungan politis lebih dipengaruhi oleh dimensi politik dari gerakan petani internasional yang semangat perlawanannya terhadap sistem pangan kapitalisme hampir menutupi dasar teori yang melandasinya, yaitu teori ekonomi rumah tangga petani. Dimensi perlawanan petani ini umumnya diletakkan di dalam kerangka pemikiran yang lebih luas antara lain kerangka 'hak' sehingga kalau bukan merujuk pada subjek petani sebagai individu, maka 'hak' itu lebih diangkat sebagai persoalan kelompok ataupun komunitas, yang umumnya melewatkan unit ekonomi rumah tangga petani.

Kedua, perkembangan agroekologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan juga terkesan menjauh dari dimensi kultural yang melingkupinya. Hal ini antara lain disebabkan karena perhatian disiplin ini cenderung dikanalisis ke dalam sistem pangan semata, terutama dalam konteks gerakan kedaulatan pangan. Pada studi agroekologi yang khas seperti pekarangan di pedesaan Jawa sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti terdahulu, peran penting agroekologi pekarangan tidak hanya terbatas pada sistem pangan, melainkan terkait dengan hampir seluruh fungsi ekonomi dalam kebudayaannya. Agroekologi pekarangan di Jawa antara lain juga berperan dalam penyediaan serat, papan, herbal tradisional, pakan ternak, ritual budaya, daur ulang limbah, iklim mikro serta keberlanjutan ekosistem rumah tangga.

Agroekologi pekarangan di Jawa mungkin dikatakan terlambat dalam perkembangannya sebagai disiplin ilmu pengetahuan modern, sebagaimana agroekologi yang tumbuh pesat di berbagai belahan dunia lain. Tetapi kemampuannya yang adaptif, yang mempertahankan corak agroekologi yang khas yang lebih sesuai dengan konsepsi agroekologi budaya, menyimpan potensi serta harapan besar dalam dialog agroekologi terutama agar disiplin yang telah berkembang secara interdisipliner itu tidak mengalami penyempitan pada kecendrungan teknis atau politis semata. Pada kenyataannya, praktik agroekologi pekarangan di Jawa tidak hanya memperlihatkan tandingan yang jauh lebih mapan daripada sistem pangan cangkakan seperti revolusi hijau, melainkan juga mencakup dimensi kultural yang luas dari kehidupan tradisional masyarakat pedesaan di Jawa.

### **Sodality dalam konteks agroekologi budaya**

Tantangan kontekstualisasi pemikiran Tjondronegoro saat ini adalah meletakkan perhatian terbesarnya mengenai partisipasi masyarakat pedesaan terutama di Jawa di dalam konteks ruang mediasi kultural yang mewujudkan dalam bentuk agroekologi budaya. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 di muka bahwa makna baru sodality sebagai ruang mediasi kultural telah memberikan ruang budaya yang lebih longgar pada agroekologi sebagai representasi agensi serta tindakan ekonomi rumah tangga petani. Tantangan ini akan terlihat nyata setidaknya pada dua hal berikut. Pertama, sebagaimana disinggung di muka, agroekologi baik sebagai ilmu pengetahuan modern maupun gerakan sosial di Indonesia tidak mengalami perkembangan sepesat praktik-praktik serupa di berbagai belahan dunia. Praktik agroekologi pekarangan di Jawa misalnya, terkesan seperti mengalami kemandegan dalam perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan modern dan gerakan sosial, setelah studi-studi awal yang dilakukan pada tahun 1930-an dan 1980-an. Tidak berkembangnya agroekologi sebagai ruang mediasi kultural di bawah pembangunan pedesaan serta revolusi hijau mungkin menjadi hambatan terbesarnya.

Kedua, agroekologi budaya yang khas dalam bentuk pekarangan di pedesaan Jawa belum dipahami sebagai sistem ekonomi rumah tangga petani yang utuh dan menyeluruh. Sementara itu, perkembangan agroekologi di dunia yang mengalami penyempitan makna dikhawatirkan membawa kecenderungan elementer pada fenomena agroekologi budaya. Dari sesi metodologi, hal ini juga akan berpengaruh, misalnya, pada penentuan variabel dan indikator yang bisa digunakan untuk memahami partisipasi masyarakat pedesaan melalui gerakan agroekologi budaya dari bawah (bottom up). Dengan kata lain, banyak aspek dalam agroekologi budaya pekarangan yang mungkin terlepas dari kecenderungan perkembangan pendekatan di dunia saat ini. Sementara itu, upaya untuk memahami agroekologi secara lebih utuh mulai diperlihatkan melalui jaringan sistem pangan regional antara dataran tinggi di Bali dengan dataran rendah yang telah berlangsung selama berabad-abad, di mana

dimensi moral menjadi penekanan yang penting di dalam sistem pangan kapitalisme saat ini (Reuter, 2019).

Kedua hal tersebut merupakan tantangan terbesar para peneliti dalam menyambung relevansi pemikiran Tjondronegoro saat ini, yaitu mengangkat praktik-praktik agroekologi yang khas di nusantara sebagai ilmu pengetahuan modern, sekaligus membumikan ilmu pengetahuan itu sebagai gerakan budaya. Dengan kata lain, memediasi kehidupan ekonomi rumah tangga petani sebagai disiplin ilmu pengetahuan modern dan gerakan agroekologi budaya yang utuh. Tantangan ini menuntut konteks kebudayaan yang bukan sebagai pendekatan dan metodologi yang elementer, melainkan sebagai abstraksi tertinggi dari kompleksitas konseptual (Mills, 2000). Upaya terhadap hal ini tidak tertutup kemungkinan mengingat praktik agroekologi budaya yang khas dalam bentuk pekarangan di Jawa telah dikaji sebelumnya secara cukup komprehensif.

Sementara itu, menempatkan agroekologi dalam tantangan kedua, yaitu sebagai gerakan budaya, berarti menyelaraskan gerakan itu dengan praktik agroekologi setempat. Pekarangan sebagai kunci dari gerakan ini perlu dilihat secara kritis terutama kaitannya dengan wacana politik yang melekat pada gerakan kedaulatan pangan. Karena agroekologi pekarangan, sebagaimana dijelaskan di muka, tidak sebatas pada konteks pangan lokal, melainkan juga konteks ekonomi yang luas dalam kebudayaan masyarakatnya. Dua tantangan tersebut, yaitu mengangkat fenomena agroekologi budaya yang khas dalam bentuk pekarangan di Jawa ke dalam abstraksi tertinggi serta sebagai gerakan budaya yang kontekstual, telah menjadi bagian dari jiwa intelektual yang terkandung di dalam pemikiran Tjondronegoro yang perlu direnungkan saat ini.

## KESIMPULAN

Membaca kembali teori ekonomi rumah tangga petani yang menjadi tumpuan agroekologi, khususnya agroekologi budaya yang khas dalam bentuk pekarangan di Jawa, memungkinkan melakukan kontekstualisasi pemikiran Tjondronegoro tentang sodality. Kontekstualisasi tentang hal itu melampaui kerangka organisasi sosial desa, yang masih terkesan tidak banyak mengalami perubahan sejak kritik Tjondronegoro lebih dari tiga dasawarsa lalu. Sodality perlu diletakkan di dalam ruang mediasi kultural di mana agroekologi budaya menjadi representasi agensi serta tindakan petani dari tekanan eksternal. Melalui proses ini partisipasi petani bisa dilihat lebih luas daripada jika dilihat melalui kerangka organisasi sosial desa. Sebagaimana fungsi agroekologi budaya yang luas yang mencerminkan partisipasi mereka, mungkin ia juga telah menjadi faktor yang menjaga keseimbangan sosial dari berbagai persoalan pembangunan pedesaan seperti penguasaan lahan pertanian yang sempit, ketimpangan penguasaan lahan yang tajam yang disinyalir telah memperluas sistem penyakapan di kalangan rumah tangga petani di Jawa, serta berbagai persoalan ekonomi rumah tangga petani yang tidak termediasi melalui kerangka organisasi sosial desa.

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa agroekologi budaya yang khas dalam bentuk pekarangan itu lebih memberikan jaminan ekonomi dalam kebudayaan masyarakatnya daripada sistem ekonomi politik revolusi hijau yang memberikan kesempatan monopoli sumberdaya pertanian dan pangan kepada sektor bisnis. Dalam hal ini, kritik Tjondronegoro terhadap organisasi sosial desa dan kegelisahannya terhadap sodality yang tidak pernah didengarkan oleh pemerintah bisa dikembangkan melalui pendekatan-pendekatan serta metode-metode pengukuran untuk mengembangkan agroekologi budaya sebagaimana ukuran-ukuran yang telah dihasilkan dari para peneliti sebelumnya. Melalui upaya ini mungkin pembangunan pedesaan akan lebih memberikan nuansa optimisme di mata sebagian besar penduduk pedesaan yang merupakan petani kecil, daripada wacana optimisme yang di bangun dari atas pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large*. University of Minnesota Press.
- Arudsothy, P. (1986). Review of Social Organization and Planned Development in Rural Java by Sediono M.P. Tjondronegoro. *Contemporary Southeast Asia*, 8(2), 173–175. <https://www.jstor.org/stable/25797897>
- Francis, C., Lieblein, G., Gliessman, S., Breland, T. A., Creamer, N., Harwood, R., Salomonsson, L.,

- Helenius, J., Rickerl, D., Salvador, R., Wiedenhoef, M., Simmons, S., Allen, P., Altieri, M., Flora, C., & Poincelot, R. (2003). Agroecology: The Ecology of Food Systems. *Journal of Sustainable Agriculture*, 22(3), 99–118. [https://doi.org/10.1300/J064v22n03\\_10](https://doi.org/10.1300/J064v22n03_10)
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution The Processes of Ecological Change in Indonesia*. University of California Press.
- Gliessman, S. R. (1997). *Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture*. Lewis Publishers.
- Gliessman, S. R. (2015). *Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems*. CRC Press.
- Mills, C. W. (2000). *The Sociological Imagination*. Oxford University Press.
- Reuter, T. (2019). Understanding Food System Resilience in Bali, Indonesia: A Moral Economy Approach. *Culture, Agriculture, Food and Environment*, 41(1), 4–14. <https://doi.org/10.1111/cuag.12135>
- Rosset, P. M., & Altieri, M. A. (2017). *Agroecology: Science and Politics*. Fernwood Publishing.
- Rosset, P. M., Val, V., Barbosa, L. P., & McCune, N. (2019). Agroecology and La Via Campesina II. Peasant Agroecology Schools and the Formation of a Sociohistorical and Political Subject. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 43(7–8), 895–914. <https://doi.org/10.1080/21683565.2019.1617222>
- Schweizer, M. (1983). Religion and Social Stratification in a Santri Village in Klaten, Central Java. *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter*, 11(32), 25–34. <https://doi.org/10.1080/03062848308729563>
- Scoones, I. (2015). *Sustainable Livelihood and Rural Developments*. Practical Action Publishing.
- Scott, J. C. (1977). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Stoler, A. (1978). Garden Use and Household Economy in Rural Java. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 14(2), 85–101. <https://doi.org/10.1080/00074917812331333331>
- Tjondronegoro, S. M. P. (1978). Recent Indonesian Rural Development: Dilemma of a Top-Down Approach. *Southeast Asian Affairs*, 139–148. <http://www.jstor.org/stable/27908342>
- Tjondronegoro, S. M. P. (1984). *Social Organization and Planned Development in Rural Java: A Study of the Organizational Phenomenon in Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java*. Oxford University Press.
- Tjondronegoro, S. M. P., & Wiradi, G. (Eds.). (1984). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Gramedia.
- Val, V., Rosset, P. M., Zamora Lomelí, C., Giraldo, O. F., & Rocheleau, D. (2019). Agroecology and La Via Campesina I. The Symbolic and Material Construction of Agroecology through the Dispositive of “Peasant-to-Peasant” Processes. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 43(7–8), 872–894. <https://doi.org/10.1080/21683565.2019.1600099>
- Van der Ploeg, J. D. (2009). *The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization*. Earthscan.
- van Ufford, P. Q. (1985). Review of Social Organization and Planned Development in Rural Java by Sediono M.P. Tjondronegoro. *Man*, 20(4), 778–779. <https://doi.org/10.2307/2802799>
- Wezel, A., & Soldat, V. (2009). A Quantitative and Qualitative Historical Analysis of the Scientific Discipline of Agroecology. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 7(1), 3–18. <https://doi.org/10.3763/ijas.2009.0400>

- White, B. (1976). *Production and Reproduction in a Javanese Village*. Columbia University.
- White, B. (1983). "Agricultural involution" and its Critics: Twenty Years After. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 15(2), 18–31. <https://doi.org/10.1080/14672715.1983.10404871>
- White, B. (2017). The Myth of the Harmonious Village. *Inside Indonesia*. <https://www.insideindonesia.org/the-myth-of-the-harmonious-village-2>
- White, B. (2018). Marx and Chayanov at the Margins: Understanding Agrarian Change in Java. *The Journal of Peasant Studies*, 45(5–6), 1108–1126. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1419191>
- White, B. (2020). 'Problems in the Empirical Analysis of Agrarian Differentiation Processes': A Reflection. <https://www.aqs.org.uk/problems-in-the-empirical-analysis-of-agrarian-differentiation-processes-a-reflection/>